

KEMITRAAN PADA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN

Oleh: Dikson Junus

Abstract

The development approach through the development actors' initiative and support at local level has been a participative-based development model. The initiative and support are encouraged through the establishment of the partnership between people and development actors, including local government and it aims at developing an interaction process in the effort to create a joint movement in alleviating poverty.

In the context of people empowerment partnership, those who establish the partnership do not make any differentiation in terms of magnitude or volume, status/legality, or their power. The partnership is linearly established, which means that there is no subordination among them. The study aims at investigating and describing the partnership among actors in the implementation of the P2KP program in Gorontalo City. It is of the kind of qualitative one with descriptive method. The data is collected using interview, observation and secondary data use. The interview is conducted using interview guideline, informal discussion and standard open interview.

The results of the study show: (1) the partnership among actors in the implementation of the P2KP program in Gorontalo City indicates the contribution of the actors' role in alleviating poverty and hence the involvement of them directly evidences that BKM, people, and other social groups are actually able to make a synergy with the government in the poverty alleviation and (2) the form of the partnership among the actors in the P2KP program is put in the context of role playing in accordance with their respective authority and in the context of joint movement.

Key words: *partnership, empowerment, role, interaction, sharing.*

Pendahuluan

Sejak dimulainya program P2KP pada tahun 1998 secara nasional, di tiap-tiap kelurahan telah terbentuk suatu lembaga masyarakat yang disebut dengan Badan Keswadayaan

Masyarakat (BKM), dan di kota Gorontalo program P2KP dimulai pada tahun 2004. BKM bersama masyarakat menyusun perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis) secara

partisipatif, sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Atas fasilitasi pemerintah dan prakarsa masyarakat, selanjutnya BKM akan menjalin kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan kelompok-kelompok peduli lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Kemitraan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kemitraan antar aktor seperti pemerintah, BKM, masyarakat, dan kelompok masyarakat

lainnya. Diperlukannya kemitraan tersebut didasarkan pada alasan untuk menghindari ketidakefektifan kegiatan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah.

Paket merupakan komponen Program P2KP yang berwujud dana stimulan yang berasal dari pemerintah pusat untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah, masyarakat dan kelompok peduli (Lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, swasta, dll) dalam upaya mempercepat kegiatan penanggulangan kemiskinan secara partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar di lokasi P2KP. Belajar dari kondisi di atas, maka diperlukan suatu bentuk penanggulangan kemiskinan yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi dengan melibatkan beberapa pihak melalui kemitraan. Program ini membutuhkan keseriusan para aktor pembangunan di daerah terutama dalam hal pendanaan yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui APBD dan kesiapan BKM. Karena itu tidak semua daerah dapat memenuhi ketentuan tersebut.

Konsep Good Governance

Memahami *governance* adalah bagaimana memahami integrasi peran agen pembangunan; pemerintah (birokrasi), pihak swasta dan *civil society*. Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukum serta keamanan yang kondusif.

Hubungan yang sinergis dan konstruktif akan terjadi manakala ada pengalokasian sumber daya yang optimal dan potensial yang dimiliki oleh masing-masing aktor (agen) pembangunan tersebut atas dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai dalam pelayanan publik (Suharyanto, 2005:86-87).

Hubungan sinergis antara masyarakat, pemerintah dan swasta menjadi bagian penting dalam *good governance* tersebut. Menurut Sulistiyani (2004:76) pemerintah diposisikan sebagai fasilitator atau katalisator, sedangkan tugas untuk pembangunan menjadi tanggung jawab seluruh komponen Negara termasuk dunia usaha dan masyarakat. Bentuk ideal relasi yang ingin diwujudkan adalah “kemitraan” antara pemerintah, masyarakat, swasta, organisasi massa, organisasi politik, organisasi profesi dan LSM. Dengan demikian konsep *good governance* merujuk pada tiga pilar utama, yaitu *public governance*, *corporate governance* dan *civil society*.

Konsep Kemitraan

Menurut Sulistiyani (2004:129-130), kemitraan dilihat dari perspektif etimologis kemitraan diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari asal kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat

dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Bertolak dari pengertian tersebut, maka faktor terbentuknya kemitraan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) ada dua pihak atau lebih; (2) memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan; (3) ada kesepakatan; (4) saling membutuhkan.

Menurut Setiawan (2004:33), misi utama dari kemitraan adalah membantu memecahkan permasalahan ketimpangan dalam kesempatan berusaha, ketimpangan pendapatan, dan ketimpangan antar wilayah yang dibangun atas landasan saling membutuhkan, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan fungsi dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan dan proporsi masing-masing terlibat. Terjadi *pooling of resources* atau penggabungan sumberdaya, sumber dana, sumber informasi untuk mendapatkan kombinasi terbaik agar memberi nilai tambah (sinergi) dalam kemitraan.

Kemitraan dapat diartikan sebagai bentuk atau usaha bersama sektor *publik* dan *private* untuk mencapai tujuan bersama. Di mana sektor *publik* menunjuk pada instansi non pemerintah atau kelompok tertentu

dalam masyarakat. Kemitraan dapat diartikan sebagai aktivitas bersama di antara kelompok yang berkepentingan berdasarkan pada pengenalan kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan mencapai tujuan yang disepakati bersama, yang dikembangkan melalui komunikasi yang efektif dan tepat waktu.

Berkowitz (2000:67-72), menyatakan bahwa kolaborasi adalah metode yang digunakan oleh organisasi atau individu yang bergabung bersama untuk meningkatkan kemampuan dari terbatasnya sumber daya organisasi melalui: (1) memperbaiki atau mengembangkan keuntungan dari suatu kegiatan melalui usaha bersama; (2) proses membangun hubungan dari suatu kegiatan melalui kekuasaan dalam mengambil keputusan; dan (3) saling tukar informasi, membagi sumber daya dan mengembangkan kapasitas untuk keuntungan bersama dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama.

Padget & Berkowitz, (2004:251-257) menyatakan kolaborasi adalah individu dan kelompok yang bekerjasama untuk keuntungan bersama dengan mengutamakan hubungan horizontal dari pada hirarki. Koalisi menunjuk lebih khusus kepada kelompok yang bekerja sama dari pada individu. Selanjutnya, kemitraan menjangkau lintas sektoral meliputi batasan yang luas dari pemerintah. Kemitraan kolaborasi merefleksikan praktek kerjasama di antara pemerintah

dan mitra kerja lain yang berkerja sama.

Berdasarkan definisi tersebut, kemitraan merupakan suatu upaya kolaboratif yang terus menerus guna mencapai tujuan bersama. Kemitraan merupakan kerjasama di antara dua atau lebih pihak (komponen) yang saling terkait dan bekerjasama sebagai mitra dan sebagai perwujudan usaha bersama dan dengan adanya komitmen bersama.

Berdasarkan hal tersebut maka bentuk kemitraan mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (1) terdapat dua atau lebih pihak (komponen) yang terlibat yakni pemerintah, swasta dan masyarakat; (2) keduanya bekerjasama sebaagai mitra, dalam hal ini tidak ada yang sifatnya membawahi pihak lain; (3) adanya tujuan bersama berdasarkan komitmen yang hendak dicapai; (4) setiap pihak memiliki tanggung jawab sendiri; (5) setiap pihak memberikan input berupa finansial, teknologi, pengetahuan atau sumber lainnya dalam sebuah proses pembelajaran.

Metode Penelitian

Penelitian tentang Kemitraan antar aktor pada program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) P2KP di Kota Gorontalo Propinsi Gorontalo merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Lokasi penelitian adalah di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) tersebut.

Sumber data terdiri dari: Pertama, Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan responden dan dari hasil pengamatan yang dilakukan dilapangan terhadap fenomena-fenomena empiris yang terjadi berkaitan dengan kemitraan antar pemerintah daerah, BKM, masyarakat dan kelompok masyarakat peduli lainnya pada program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) P2KP di Kota Gorontalo. Kedua, Data sekunder yaitu data yang diperoleh sudah diolah seperti dokumen-dokumen tertulis dan studi kepustakaan.

Penelitian ini digunakan tehnik wawancara bebas (*interview*) sebagai tehnik umum dengan maksud untuk menjaga data primer yang relevan terhadap setiap variabel penelitian maka wawancara yang dilakukan didasarkan pada pedoman wawancara yang berisikan pertanyaan terbuka (*open ended question*), kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan demikian diharapkan responden akan dapat menjawab dengan leluasa dan bebas dalam memberikan berbagai alternatif jawaban. Langkah-langkah mengumpulkan/memperoleh data di lapangan atau tehnik penelitian digunakan: Pertama, Pengamatan (*Observasi*). Kedua, Tahapan wawancara. Ketiga, Telaah Dokumen dan Studi Kepustakaan.

Analisis data penelitian ini berasal dari beberapa sumber informasi, yang didapat dari wawancara mendalam. Proses pengolahan data dengan menggunakan analisis tema.

Pelaksanaan Kemitraan Pada Program Paket P2KP

Program Paket P2KP di Kota Gorontalo merupakan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara terpadu. Terpadu yang dimaksudkan disini adalah (1) terpadu dalam hal pendanaan dan (2) terpadu dalam pelaksanaan kegiatan.

Kemitraan antar aktor Kota Gorontalo dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui program Paket P2KP merupakan langkah tindak lanjut dari upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh masyarakat melalui kegiatan belajar yang difasilitasi melalui P2KP. Untuk mengetahui kontribusi peran para aktor dan indentifikasi bentuk kemitraan pada pelaksanaan program Paket P2KP, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Persiapan Daerah

Langkah awal yang dilakukan sebelum pelaksanaan program Paket P2KP di kota Gorontalo adalah mengajukan surat permohonan minat kepada Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta. Pengajuan surat permohonan ini dilakukan oleh pemerintah kota Gorontalo dengan mengacu pada pola sharing yang telah ditetapkan. Kegiatan

berikutnya adalah kampanye media. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah kota Gorontalo melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (disingkat TKPKD) yang dibentuk oleh pemerintah kota Gorontalo berdasarkan SK Walikota Gorontalo nomor 1176 tahun 2007. Tim ini beranggotakan seluruh instansi pemerintah kota Gorontalo.

Berdasarkan uraian tersebut, peran pemerintah pada tahap persiapan daerah dalam melaksanakan program Paket P2KP, baik mengajukan permohonan minat kepada pemerintah pusat dan melakukan kampanye program Paket melalui media masih mendominasi, karena hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah dalam melakukan persiapan terkait dengan pelaksanaan program Paket P2KP.

Lokakarya Perumusan dan Pembentukan Pokja

Kegiatan lokakarya perumusan Pokja Paket, bertujuan merumuskan tugas, keanggotaan Pokja dan mekanisme kerja Pokja Paket. Kedekatan hubungan pemerintah, BKM, dan masyarakat dalam kegiatan ini adalah membahas dan merumuskan Pokja melalui FGD perumusan tugas, FGD keanggotaan Pokja, dan FGD mekanisme kerja Pokja. Kegiatan ini difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku Ketua pelaksana Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (di singkat

TKPKD) tingkat kota Gorontalo bersama Konsultan Manajemen Wilayah (di singkat KMW). Peserta yang menghadiri kegiatan lokakarya ini adalah, dinas/instansi pemerintah kota Gorontalo, perwakilan BKM, perwakilan masyarakat dari masing-masing kelurahan, Lurah, Camat, dan Perguruan Tinggi.

Kemitraan yang terjadi dalam pembentukan Pokja Paket, di mana pada lokakarya pembentukan Pokja Paket melibatkan aktor-aktor dari perguruan tinggi, pemerintah daerah, masyarakat, Koordinator BKM. Mekanisme pemilihan dilakukan secara langsung dan terbuka. Pembentukan Pokja Paket tetap mengedepankan aspek nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip sosial. Selanjutnya nama-nama terpilih ditetapkan sebagai Pokja Paket.

Keanggotaan Pokja Paket melibatkan beberapa aktor seperti dari kalangan perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat, perwakilan BKM di setiap kecamatan. Keterlibatan aktor-aktor tersebut dalam pembentukan Pokja Paket yang dimulai pembahasan tentang keberadaan, tugas, dan pemilihan anggota Pokja Paket menandakan bahwa pada proses persiapan pelaksanaan Paket kemitraan mulai terbangun antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelompok-kelompok peduli lainnya.

Keterlibatan berbagai aktor dalam Pokja Paket ini dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui program Paket P2KP sangat beralasan

karena penanggulangan kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama dengan mengedepankan prinsip kerelawanan. Hal ini tidak mudah dilaksanakan oleh pihak-pihak lainnya. Konsep kemitraan yang lahir ini dengan melibatkan berbagai aktor masih dalam bingkai kemitraan antara pemerintah daerah, BKM, masyarakat kelompok peduli lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, pada tahap pembentukan Pokja Paket, kontribusi peran pemerintah, BKM, perwakilan masyarakat dan unsur-unsur lain seperti perguruan tinggi memberikan saran atau gagasan yang berhubungan dengan pemilihan anggota Pokja Paket, dan tergabung dalam anggota Pokja Paket. Peran lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai fasilitator kegiatan, dalam hal di fasilitasi oleh Bappeda kota Gorontalo. Sehingga identifikasi bentuk kemitraan pada tahap ini adalah sharing antar pemerintah, BKM dan masyarakat.

Sosialisasi Program Paket P2KP

Setelah terbentuknya Pokja Paket, dilakukan sosialisasi program Paket P2KP di kelurahan. Kemitraan yang terjadi dalam kegiatan sosialisasi program Paket P2KP adalah kegiatan ini difasilitasi oleh Pokja Paket dan BKM. Kegiatan lokakarya di tingkat kelurahan ini difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan, dan BKM. Kegiatan lokakarya tingkat kelurahan dihadiri oleh anggota BKM,

masyarakat umum, dan organisasi/kelompok masyarakat di tingkat kelurahan. Sosialisasi dimaksudkan untuk menginformasikan konsep, syarat pelaksanaan, ketentuan-ketentuan umum program Paket.

Pada tahap sosialisasi program Paket P2KP, kontribusi peran pemerintah kelurahan, dan BKM sebagai fasilitator dan Pokja Paket sebagai narasumber, sedangkan anggota BKM, masyarakat umum sebagai peserta memberikan saran, atau gagasan. Identifikasi bentuk kemitraan pada tahap sosialisasi ini adalah pertimbangan peran antar aktor-aktor tersebut.

Perencanaan Kegiatan Paket

Penentuan kegiatan ini dilakukan bersama antara BKM dan Pemerintah Daerah. (1) melalui rapat koordinasi tingkat kota yang difasilitasi oleh Bappeda Kota Gorontalo bersama Pokja Paket dan dihadiri oleh seluruh BKM dan Dinas. Dalam rapat koordinasi tersebut antara BKM dengan Pemerintah Daerah diputuskan jenis-jenis kegiatan yang tertuang dalam PJM Pronangkis sebagai kegiatan yang akan didanai melalui dana Paket. (2) rapat koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kelurahan. Rapat ini difasilitasi oleh BKM dan Pemerintah Kelurahan dan dihadiri oleh anggota Pokja Paket, pemerintah, dinas terkait dan/atau kelompok-kelompok masyarakat di kelurahan seperti LPM, PKK, tokoh masyarakat.

Sinergi antara BKM dengan dinas terkait yang telah memutuskan kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan dan dilaksanakan secara bersama kemudian membentuk suatu wadah yang disebut dengan Panitia Kemitraan. Kepedulian Pemerintah Kota dalam mengakomodir hasil PJM Pronangkis merupakan sesuatu yang luar biasa.

Berdasarkan uraian tersebut, pada tahap penentuan kegiatan, kontribusi peran pemerintah dan BKM adalah sebagai perencanaan kegiatan program Paket P2KP, sedangkan unsur lain seperti Pokja Paket dan KMW melakukan monitoring dan pendampingan pada proses kegiatan tersebut. Sehingga identifikasi bentuk kemitraan pada tahap penentuan kegiatan adalah sharing antar pemerintah, BKM, Pokja Paket, dan KMW.

Pembentukan Panitia Kemitraan

Peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait, BKM, dan masyarakat dalam pembentukan Panitia Kemitraan adalah menentukan siapa saja yang akan duduk sebagai anggota Panitia Kemitraan. Pihak-pihak tersebut melakukan identifikasi terhadap calon anggota panitia, kemudian dibahas dalam rapat pembentukan Panitia Kemitraan di tingkat Kelurahan yang difasilitasi oleh BKM, dinas terkait dan Pemerintah Kelurahan serta dihadiri oleh anggota Pokja Paket, anggota BKM, pengurus LPM, Pemerintah

Kelurahan, dinas/instansi pemerintah terkait, dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Pemerintah Daerah melalui dinas/instansi pemerintah terkait, BKM, dan unsur-unsur masyarakat lainnya yang tergabung dalam Panitia Kemitraan akan melaksanakan tugasnya mulai dari: (1) menyusun proposal kegiatan yang telah disepakati bersama, (2) menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang dianggap dapat membantu melaksanakan kegiatan bersama, (3) melakukan pengurusan administrasi kegiatan/proyek, (4) melaksanakan kegiatan atau proyek, (5) mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan atau proyek.

Pada tahap pembentukan panitia kemitraan, kontribusi peran pemerintah, BKM, dan masyarakat tampak pada partisipasinya sebagai anggota panitia kemitraan. Dan fasilitator musyawarah pembentukan panitia kemitraan diperankan oleh pemerintah dan BKM. Sedangkan masyarakat dalam musyawarah tersebut menyampaikan saran atau gagasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah. Unsur lain seperti Pokja Paket dan KMW melakukan monitoring dan pendampingan pada proses kegiatan tersebut. Sehingga identifikasi bentuk kemitraan pada tahap penentuan kegiatan adalah terjadinya keseimbangan peran antar aktor-aktor tersebut.

Penyusunan dan Pengajuan Proposal Kegiatan

Setelah Panitia Kemitraan terbentuk, maka Panitia Kemitraan menyusun proposal kegiatan. Dalam penyusunan proposal kegiatan ini terjalin kemitraan antara Pemerintah Daerah melalui dinas terkait, BKM, yang tergabung dalam Panitia Kemitraan. Dalam hal ini, kedua pihak mempunyai peran yang sama menyusun proposal sesuai dengan jenis kegiatan yang telah disepakati bersama pada awal kegiatan perencanaan.

Setelah proposal kegiatan disusun bersama antara BKM dengan dinas terkait dalam Panitia Kemitraan, kemudian proposal kegiatan proyek tersebut diverifikasi dan direkomendasi oleh Tim verifikasi dan selanjutnya diajukan ke Pemerintah Kota melalui Satuan Kerja (Satker) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (Bappeda) Kota Gorontalo selaku pengguna anggaran untuk sumber dana dari APBD. Di samping itu juga, diajukan kepada Satuan Kerja (Satker) Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo selaku pengguna anggaran untuk sumber dana dari APBN. Agar mendapat persetujuan dari Satker Bappeda PM Kota Gorontalo dan Satker PBL-PU Propinsi Gorontalo, proposal yang diajukan memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan pedoman teknis Paket.

Pada tahap penyusunan dan pengajuan proposal kegiatan oleh Panitia Kemitraan, kontribusi peran pemerintah, dan BKM terlihat pada aktivitas dalam menyusun proposal kegiatan dan aktivitas lain seperti pengadaan material dalam panitia kemitraan. Dinas/instansi pemerintah sebagai pihak yang mempunyai keahlian dalam hal-hal bersifat teknis berperan melakukan bimbingan kepada anggota panitia kemitraan lainnya. Unsur lain seperti Pokja Paket dan KMW melakukan monitoring dan pendampingan pada proses kegiatan tersebut. Sehingga identifikasi bentuk kemitraan pada tahap ini adalah sharing antar birokrasi, BKM, KMW, dan Pokja Paket sesuai dengan peran masing-masing aktor tersebut.

Penetapan Proposal Kegiatan

Mekanisme penetapan proposal adalah *pertama*, mengacu pada dokumen PJM Pronangkis. *Kedua*, mengacu dari tingkat kemendesakan kegiatan ini dilakukan. *Ketiga*, mengacu dari seberapa besar dampak kegiatan tersebut terhadap masyarakat miskin disekitar rencana lokasi kegiatan. *Keempat*, mengacu kepada lembaga rujukan (kinerja BKM) artinya sejauhmana keberadaan BKM betul-betul dapat mencerminkan sebuah lembaga nilai dimasyarakat baik transparansi, akuntabilitas dan tata organisasi. *Kelima*, adalah melihat sejauhmana kerangka kemitraan yang

terbangun antara masyarakat, dinas dan kelompok peduli.

Pada tahap penetapan dan penilaian proposal kegiatan panitia kemitraan, kontribusi peran pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat adalah menyusun pedoman program Paket, menentukan persyaratan administrasi dan menentukan kriteria umum proposal kegiatan. Sedangkan Pokja Paket perannya adalah menentukan kriteria tambahan sesuai dengan kondisi daerah, melakukan penilaian kelayakan proposal, dan menetapkan proposal yang layak didanai dengan dana Paket P2KP. Peran yang dilakukan oleh pemerintah kota melalui dinas terkait, dan BKM dalam kapasitas sebagai panitia kemitraan adalah berhak mengetahui proses penetapan sekaligus mempunyai kesempatan menyampaikan gagasan atau ide dalam menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan proposal kegiatan yang telah diusulkan. Identifikasi bentuk kemitraan pada tahap ini adalah sharing antar agen

Penyaluran Dana Paket P2KP

Pelibatan para aktor seperti dinas/instansi pemerintah terkait, BKM, dan Pokja. Peran dinas pemerintah kota dengan BKM menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Dalam hal ini, dinas pemerintah kota dan BKM berada dalam satu pihak, yaitu pihak kedua sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan PAKET (SPPB PAKET). Adapun pihak

pertama dalam SPPB PAKET adalah pemerintah pusat yang diwakili oleh PJOK Paket P2KP sebagai pihak yang terpisah dari pihak kedua. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk kemitraan yang dibangun didasarkan atas prinsip kebersamaan karena kedua pihak mempunyai peran yang sama dan bertanggungjawab terhadap penggunaan dana Paket P2KP. Peran dan tanggungjawab bersama kedua pihak tersebut mengandung prinsip kesetaraan karena kedua pihak berada pada posisi yang setara.

Selain dinas/instansi pemerintah terkait dan BKM yang merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan, peran Pemerintah Kelurahan dalam hal ini Kepala Kelurahan (Lurah) sebagai unsur pemerintah di tingkat kelurahan memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya dapat berjalan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain hal tersebut, kemitraan juga terjadi pada saat Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap proposal Panitia Kemitraan, ini dapat dilihat pada struktur anggota Pokja Paket yang terdiri dari unsur perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat. Selain Pokja Paket yang melakukan verifikasi ada juga dari pihak konsultan, Bappeda, dan PJOK yang mewakili unsur pemerintah pusat. Setelah dokumen proposal dan dokumen penyaluran dana diverifikasi oleh tim verifikasi, pada proses selanjutnya dilakukan penyaluran dana Paket P2KP. Dana

Paket P2KP tersebut berasal dari dua sumber, yakni APBD dan APBN.

Kemitraan yang terjadi dalam proses pencairan dana tersebut, bahwa dalam surat perjanjian pemberian bantuan Paket (SPPB PAKET), PJOK Paket P2KP Kota Gorontalo berdasarkan keputusan Walikota Gorontalo Nomor 601 tahun 2008 bertindak atas sama Pemerintah Indonesia sebagai pihak pertama melakukan perjanjian dengan pihak kedua yaitu Koordinator BKM dan Kepala Dinas.

Pada tahap penyaluran dana Paket P2KP, kontribusi peran pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat yang diwakili oleh PJOK Paket adalah melakukan verifikasi terhadap proposal kegiatan panitia kemitraan. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, maka PJOK Paket selaku pihak pertama menandatangani SPPB Paket. Kontribusi peran pemerintah, dalam hal ini dinas pemerintah kota dan koordinator BKM selaku pihak kedua menandatangani SPPB Paket. Peran lain dinas pemerintah kota, dalam hal ini unsur Bappeda merekomendasi proposal kegiatan yang dinyatakan layak oleh tim Pokja. Sedangkan Pokja Paket dan KMW berperan memverifikasi dan merekomendasi proposal kegiatan untuk didanai dengan dana Paket P2KP. Identifikasi bentuk kemitraan pada tahap ini adalah sharing peran antara pemerintah pusat, dinas

pemerintah kota, Bappeda Kota, BKM, Pokja dan KMW.

Tahap pelaksanaan kegiatan Paket P2KP

Aktivitas kemitraan yang dilakukan oleh kedua pihak dalam Panitia Kemitraan adalah kedua pihak bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan kegiatan proyek, tidak terbatas pada pembagian tugas. Sebagai wujud tanggung jawab dinas mitra sebagai lembaga yang mengetahui atau lembaga yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu. Peran dinas mitra melakukan bimbingan secara terus menerus terhadap panitia terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas kepanitiaan. Upaya ini dilakukan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami cara melakukan suatu pekerjaan dengan baik, di samping itu juga terjalin komunikasi timbal balik dan proses konsultatif. Selain melakukan bimbingan teknis, dinas mitra juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan/proyek yang sedang dikerjakan.

Peran yang dilakukan oleh anggota panitia kemitraan lainnya dari unsur BKM, dalam pelaksanaan kegiatan Paket adalah mengelola administrasi dan keuangan proyek. Selain itu juga menyediakan bahan-bahan atau material yang berhubungan dengan pekerjaan proyek, dan

melakukan pengawasan terhadap pekerjaan proyek bersama dinas mitra.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan Paket P2KP, kontribusi peran pemerintah, dalam hal ini pemerintah dinas mitra melakukan bimbingan, pengawasan pekerjaan, dan menyediakan dana. Kontribusi peran BKM adalah menyediakan bahan-bahan atau material, mengelola kegiatan, dan melakukan pengawasan pekerjaan. Masyarakat berperan sebagai pelaksana pekerjaan, dan menyediakan swadaya secara sukarela. Pokja Paket melakukan perannya sebagai pihak yang melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Pelaksanaan pekerjaan proyek yang didanai dengan Paket P2KP dilaksanakan dua tahap. Tahap I pekerjaan proyek didanai dengan anggaran yang bersumber dari Pemerintah Daerah atau dari APBD dan tahap II dikerjakan dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat atau dari APBN.

Tahap Pertanggungjawaban Paket P2KP

Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya dilakukan bersama-sama oleh BKM dan Pemerintah Daerah. Aspek yang dipertanggungjawabkan meliputi seluruh yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya serta pengelolaan kegiatan. Sebelum laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan proyek diserahkan kepada Pokja Paket dan unsur Bappeda, terlebih dahulu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui media seperti forum rapat BKM, papan informasi.

Rapat pertanggungjawaban kegiatan Paket P2KP dihadiri oleh seluruh anggota panitia kemitraan, BKM, LPM, Lurah, tim fasilitator, Pokja, dan masyarakat di kelurahan. Hasil rapat forum menyepakati menerima pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Paket P2KP oleh panitia kemitraan dan menyebarkan hasil kesepakatan rapat pertanggungjawaban tersebut melalui media papan informasi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selain disampaikan secara lisan dalam forum, juga disampaikan melalui media papan informasi laporan pertanggungjawaban yang disajikan pada setiap saat selama pelaksanaan pekerjaan proyek. Masyarakat diberi kesempatan untuk menanggapi atau mengoreksi laporan pertanggungjawaban panitia kemitraan. Jika terjadi kesalahan dalam laporan pertanggungjawaban tersebut, panitia kemitraan melakukan perbaikan terhadap laporan pertanggungjawaban atau perbaikan terhadap proyek yang dianggap bermasalah. Pelaksanaan kemitraan dalam pertanggungjawaban lebih menekankan pada pertanggungjawaban kepada publik dalam kerangka pelaksanaan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, di

samping pertanggungjawaban secara administrasi kepada pihak pemerintah. Menurut salah seorang warga masyarakat mengatakan bahwa.

Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan juga disampaikan melalui media papan informasi laporan pertanggungjawaban yang disajikan pada setiap saat selama pelaksanaan pekerjaan proyek. Masyarakat diberi kesempatan untuk menanggapi atau mengoreksi laporan pertanggungjawaban panitia kemitraan. Jika terjadi kesalahan dalam laporan pertanggungjawaban tersebut, panitia kemitraan melakukan perbaikan terhadap laporan pertanggungjawaban atau perbaikan terhadap proyek yang dianggap bermasalah. Melalui proses pertanggungjawaban inilah, evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan dilakukan untuk kemudian menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan. Pelaksanaan kemitraan dalam pertanggungjawaban lebih menekankan pada pertanggungjawaban kepada publik dalam kerangka pelaksanaan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, di samping pertanggungjawaban secara administrasi kepada pihak pemerintah.

Peran aktor dalam pelaksanaan program Paket P2KP seperti yang diuraikan di atas, menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan program Paket P2KP melibatkan beberapa aktor seperti pemerintah, BKM, Masyarakat, dan Pokja Paket. Keterlibatan aktor-aktor tersebut menindikasikan bahwa penanggulangan kemiskinan melalui

program tersebut dilaksanakan secara terpadu, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, masyarakat, serta organisasi-organisasi non pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pembagian peran antara pemerintah, BKM, masyarakat, dan Pokja Paket khususnya di tingkat daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Gorontalo berserta jajaran Pemerintah Kota dalam pelaksanaan program Paket P2KP memberikan kesempatan kepada pihak-pihak lain untuk berperan dalam penanggulangan kemiskinan. Sehingga terjalin hubungan yang linear, lintas sektoral, tidak membedakan status atau legalitas/kekuatan atau besar/volume.

Penutup

Pelaksanaan kemitraan antar aktor pada program Paket P2KP di kota Gorontalo memperlihatkan adanya kontribusi peran para aktor seperti pemerintah, BKM, masyarakat, dan Pokja Paket. Kontribusi peran para aktor pada program Paket P2KP tersebut dimulai dari tahap persiapan daerah dalam melaksanakan program, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban kegiatan. Dalam pelaksanaan kemitraan antar aktor pada Program Paket pemeran terbesar dalam pelaksanaan kemitraan secara berurut adalah: (1). Pemerintah. (2). BKM.. (3). Masyarakat. (4). Pokja Paket.

Daftar Pustaka

- Departemen Pekerjaan Umum, 2008, *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*.
- Dwiyanto, Agus., 1996. *Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Relevansi Terhadap Reformasi Administrasi Negara* dalam Jurnal Kebijakan dan Administasi Publik Volume 1, no 1, 1996
- Keban, Yeremias T., 2000, *Good Governance dan Capacityl Building Sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan, dalam Jurnal Perencanaan Pembangunan*, Jakarta
- Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) 5 Kota Gorontalo., 2007, *Laporan Pelaksanaan Paket P2KP Kota Gorontalo*. Gorontalo
- Lele, Gabriel., 2006. *Membangun Komunitas Kebijakan: Konsep, Urgensi, dan Implikasinya* dalam jurnal politik dan manajemen publik "Interaksi" Vol. I no. 2, September 2006.
- Setiawan, Bakti., 2002. *Materi Perkuliahan Metode dan Teknik Perencanaan*. MPKD UGM.
- Suharyanto, Hadriyanus., 2005, *Administrasi Publik, Entrepreneurship, Kemitraan, dan Reinventing Goverment*, Media Wacana, Yogyakarta.
- Sulistiyani Ambar Teguh., 2004, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta.